PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Survey Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)

Tulus Harefa

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the Revenue Service and Financial Management in the Regency of Bandung. The phenomenon that occurs is the accounting and reporting systems are inaccurate or not recorded and government accounting standards not yet an accrual basis so as to reduce the quality of financial reporting. The purpose of this study is to analyze and assess how much influence the local financial accounting systems and government accounting standards to the quality of the financial statements at the Revenue Service and Financial Management in the Regency of Bandung.

The method used in this research is descriptive and verification method. Descriptive method used to describe the area of financial accounting system variables, variables government accounting standards and the variable quality of financial reporting. To determine the effect of financial accounting system and the local government accounting standards do statistical testing. The test statistic used is designing the structural model, designing a measurement model, construct the path diagram, test the model fit. Suitability test structural models and hypotheses using software SmartPLS 2.0.M3.

The results showed that the area of financial accounting system with the positive direction of the high impact on the quality of financial reporting and accounting standards were influential government with the positive direction of the quality of financial reporting at the Revenue Service and Financial Management in the Regency of Bandung.

Keywords: Regional Financial Accounting System, the Government Accounting Standards, Quality of financial statements

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336). Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut (Ardeno Kurniawan, 2013). Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat (Ardeno Kurniawan, 2013). Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Ardeno Kurniawan, 2013).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Nurlan Darise, 2008:2). Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya (Ulum, 2008). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010:9). Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2010:9). Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo

anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Erlina Rasdianto, 2013:23).

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai (Sri Astuti, 2013). Karaktersitik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Erlina Rasdianto, 2013:8). Keempat karaktersitik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami (Erlina Rasdianto, 2013:8).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK (Ifa Ratifah, 2012:30). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ifa Ratifah, 2012:30). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Liza rahayu dkk, 2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas (Bastian 2006:87). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan (Bastian 2006:87). Opini Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (Bastian 2006:87). Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) yaitu penyimpangan yang material dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Bastian 2006:87).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Liza rahayu dkk, 2014). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Liza rahayu dkk, 2014). Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, Ketua BPK RI mengatakan bahwa BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD (Harry Azhar Azis, 2014 dalam Indra Arief Pribadi, 2014).

Bupati Kabupaten Bandung mengatakan LKPD Kabupaten Bandung yang mendapatkan status disclaimer dari BPK merupakan sebuah kemunduran karena dari dulu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Dadang Naser, 2014 dalam Pikiranrakyat.com, 2014). *Disclaimer* itu artinya BPK tidak memberikan pendapat dan tidak bisa mengambil hubungan antara bukti-bukti yang disampaikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada (Agus Joko Pramono, 2014 dalam Siti Nuraisyah Dewi, 2014). Tentu saja dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat (Bahrullah Akbar, 2015 dalam BPK RI, 2015).

Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu (Anwar Nasution, 2009). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2004:35).

Pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Agus Mulyanto, 2009 dalam As Syifa Nurillah dan Dul Muid, 2014). Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan (Bastian, 2007:4). Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan

dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Mahmudi, 2010:27).

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Deddi Nordiawan 2010:201). Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat (Ifa Ratifah, 2012). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah (Ifa Ratifah, 2012).

Terdapat kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib (Ardeno Kurniawan, 2013). Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang andal (Ardeno Kurniawan, 2013). Menurut sekretaris daerah kabupaten bandung kelemahan Pemerintah Kabupaten Bandung karena pengelolaan aset daerah yang banyak tidak tercatat (Sofian, 2015 dalam M.balebandung.com, 2015). Banyaknya aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Bandung, membuat pengelolaannya sulit dilakukan (Sofian, 2015 dalam M.balebandung.com, 2015). Ditambah tidak diiringi kompetensi manajemen yang baik (Sofian, 2015 dalam M.balebandung.com, 2015). Persoalan berat yakni manajemen aset karena aset Pemerintah Kabupaten Bandung senilai Rp 67 triliun tidak diuraikan dengan jelas (Dadang Naser, 2014 dalam Pikiranrakyat.com, 2014).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah di terima secara umum (Bastian, 2010:137). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2011:271). Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya (Deddi Nordiawan, 2009:25). Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2009:25).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Tujuan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful* (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Masalah di dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan penerapan akuntansi basis akrual (Harry Azhar Azis, 2014 dalam BPK RI, 2014). Berdasarkan pemeriksaan atas 184 LKPD, BPK menemukan kasus-kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam

menerapkan akuntansi berbasis akrual (Harry Azhar Azis, 2014 dalam BPK RI, 2014). Sedangkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun 2015 (Harry Azhar Azis, 2014 dalam BPK RI, 2014). Pada umumnya, Pemerintah Daerah belum menyiapkan peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya rencana pengembangan sistem/aplikasinya serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai di setiap satuan kerja (Harry Azhar Azis, 2014 dalam BPK RI, 2014). Setiap daerah, harus siap menerapkan SAP berbasis akrual (Harry Azhar Azis, 2014 dalam BPK RI, 2014). Jika tidak, opini BPK terhadap LKPD bisa turun (Harry Azhar Azis, 2014 dalam BPK RI, 2014).

Seperti di Kabupaten Garut, menurut Bupati Garut persoalan yang masih menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian adalah salah satunya karena penyajian laporan keuangannya belum sesuai standar akuntansi pemerintahan (Rudy Gunawan, 2015 dalam Garutkab.go.id, 2015). Sama halnya dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyajikan laporan keuangannya belum menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Asep Sumpena, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hasil studi empiris mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi kualitas laporan keuangan yang belum baik. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah pada kualitas laporan keuangan dapat diperbaiki dengan meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi mamfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6), sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Adapun menurut Abdul Halim (2007:43), sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sedangkan menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual atau menggunakan komputer. Menurut Deddi Nordiawan (2010:201), Bastian (2010:319), dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1) Pencatatan
2) Pengikhtisaran
3) Pelaporan

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Tanjung (2012) dalam dalam Vicky Agustiawan (2013), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Sedangkan menurut menurut Indra Bastian (2010:138) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Indra Bastian (2010:140) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, penyajian laporan keuangan terdiri sebagai berikut:

1) Basis akrual
2) Komponen laporan keuangan
3) Periode pelaporan

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam Susilawati (2014) mengemukakan bahw kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Menurut Indra Bastian (2010:9), laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Mahmudi (2011:143), laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:21), laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi

(keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan
2) Andal
3) Dapat dibandingkan
4) Dapat dipahami

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2004:35) mengemukakan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Menurut Bastian (2007:4) mengemukakan jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sementara menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Sedangkan menurut Agus Mulyanto (2009) dalam As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Indra Bastian (2010:138) mengemukakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan keualitas laporan keuangan pemerintah. Adapun menurut Mahmudi (2011:271) mengemukakan bahwa standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Sementara menurut Deddi Nordiawan (2009:25) mengemukakan penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2013:47), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent
   Menurut Sugiyono (2013:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Variabel independen pada penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2).
2. Variabel terikat atau dependent
   Menurut Sugiyono (2013:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
   Variabel dependent dalam hal ini adalah Kualitas Laporan Keuangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):

a. Wawancara (Interview)
   Menurut Umi Narimawati (2010:40) , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
   Adapun wawancara dilakukan terhadap pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
b. Kuesioner
   Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Adapun kuesioner dilakukan kepada pegawai bagian akuntansi, bagian bendahara dan subag keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitianpenelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Penarikan Sampel

Populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, pegawai bagian akuntansi, bendahara, dan subag keuangan.

Menurut Umi Narimawati (2010:38), sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Metode penarikan sampel digunakan mengacu pada pendekatan *Slovin*, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{N}\ e^2} = \frac{42}{1+42\mathrm{x}10\%^2} = 30 \text{ orang}$$

Sumber: Umi narimawati (2010:38)

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%,10%)

Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang.

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif
   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Data Verifikatif

   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0.* Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kulaitas laporan keuangan.

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Hasil Pengujian Validitas

   Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

   Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

   Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk mesing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) atau andal.

4.1.2 Analisis Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk 3 indikator seperti terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %	Kategori
1.	Pencatatan	337	450	74,89	Baik
2.	Pengikhtisaran	698	900	77,56	Baik
3.	Pelaporan	87	150	58,00	Cukup Baik
Total Akumulasi		**1122**	**1500**	**74,80**	Baik

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang di ukur menggunakan tiga indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 74,80%. Nilai 74,80% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) tergolong baik yang berada pada interval 68,01% - 84,00%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung tergolong baik, terdapat *gap* sebesar 25,20% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah.

4.1.3 Analisis Deskriptif Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk 3 indikator seperti terlihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %	Kategori
1.	Basis Akrual	73	150	48,67	Kurang
2.	Komponen Laporan Keuangan	107	150	71,33	Baik
3.	Periode Pelaporan	111	150	74,00	Baik
Total Akumulasi		**291**	**450**	**64,67**	Cukup Baik

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel standar akuntansi pemerintahan yang di ukur menggunakan tiga item pernyataan dengan masing-masing satu indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar 64,67%. Nilai 64,67% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) tergolong cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung masih tergolong cukup baik, terdapat *gap* sebesar 35,33%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam standar akuntansi pemerintahan.

4.1.4 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan diukur menggunakan 4 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk 4 indikator seperti terlihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase %	Kategori
1.	Relevan	329	450	73,11	Baik
2.	Andal	451	600	75,17	Baik
3.	Dapat Dibandingkan	220	300	73,33	Baik
4.	Dapat Dipahami	99	150	66,00	Cukup Baik
Total Akumulasi		**1099**	**1500**	**73,27**	Baik

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada variabel kualitas laporan keuangan yang di ukur menggunakan empat indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 73,27%. Nilai 73,27% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) tergolong baik yang berada pada interval 68,01% - 84,00%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung tergolong baik, terdapat *gap* sebesar 26,73%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kualitas laporan keuangan.

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS 2.0*, maka hasil analisis verifikatif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dengan kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,821 dan termasuk dalam kategori hubungan yang tinggi berada pada interval korelasi antara 0,70-0,90. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana jika sistem akuntansi keuangan daerah semakin baik, maka laporan keuangan akan semakin berkualitas. Sebaliknya, jika sistem akuntansi keuangan daerah menurun maka kualitas laporan keuangan akan semakin menurun.
2. Nilai Koefisien determinasi (parsial) sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) memberikan pengaruh sebesar 56,56% atau 0,565 terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang tinggi antara 0,49-0,81. Sedangkan selisihnya sebesar 43,44% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.
3. Nilai Koefisien determinasi (simultan) sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan standar akuntansi pemerintahan (X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 79,25% (tinggi) terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sedangkan selisihnya sebesar 20,75% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6 Hasil Analisis Verifikatif Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS 2.0*, maka hasil analisis verifikatif standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara standar akuntansi pemerintahan (X_2) dengan kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,615 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang/cukup berada pada interval korelasi antara 0,40-0,70. Artinya standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana jika standar akuntansi pemerintahan semakin baik, maka laporan

keuangan akan semakin berkualitas. Sebaliknya, jika standar akuntansi pemerintahan menurun maka kualitas laporan keuangan akan semakin menurun.

2. Nilai koefisien determinasi (parsial) Standar akuntansi pemerintahan (X_2) memberikan pengaruh sebesar 22,69% atau 0,226 terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang sedang/cukup antara 0,16-0,49. Sedangkan selisihnya sebesar 77,31% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.
3. Nilai Koefisien determinasi (simultan) sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan standar akuntansi pemerintahan (X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 79,25% (tinggi) terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sedangkan selisihnya sebesar 20,75% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 13,702 lebih besar dari t_{kritis} (1,645). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel}, maka pada tingkat kekeliruan 10% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} korelasi standar akuntansi pemerintahan sebesar 7,431 lebih besar dari t_{tabel} (1,645). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel}, maka pada tingkat kekeliruan 10% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 13,702 lebih besar dari t_{tabel} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Fenomena mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang dikemukakan oleh Ardeno Kurniawan (2013) bahwa masih lemahnya sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan tidak tertib, sedangkan menurut Sofian (2015) kelemahan Pemerintah Kabupaten Bandung karena pengelolaan aset daerah yang banyak tidak tercatat. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator pencatatan dengan persentase 74,89% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, terdapat *gap* sebesar 25,11%. Selanjutnya fenomena yang terjadi menurut Ardeno Kurniawan (2013) bahwa terdapat kelemahan dalam pelaporan keuangan daerah, pengelola keuangan daerah kesulitan pengelola keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator pelaporan sebesar 58,0% ini dikategorikan cukup baik terdapat *gap* sebesar 42,0%, hal ni menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaporan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sebesar 56,56% terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai korelasi sebesar 0,821 yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Bandung. Arah hubungan positif sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin baik akan diikuti dengan kualitas laporan keuangan baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 56,56% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya 43,44% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 74,80% dan termasuk kategori baik yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah sudah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator pengikhtisaran sebesar 77,56%, selanjutnya indikator pencatatan sebesar 74,89% dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator pelaporan sebesar 58,00%. Terdapat *gap* sebesar 25,20% yang merupakan masalah yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah. Selanjutnya kualitas laporan keuangan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 73,27% dan masuk dalam kategori baik yang artinya kualitas laporan keuangan sudah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator andal sebesar 75,17%, dapat dibandingkan sebesar 73,33%, relevan sebesar 73,11%, dan indikator paling rendah adalah dapat dipahami sebesar 66,00%, namun masih terdapat *gap* sebesar 26,73%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat melalui nilai *loading factor*, dilakukan dengan meningkatkan faktor pencatatan (0,930), pengikhtisaran (0,937) dan pelaporan (0,928) selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu relevan (0,941), andal (0,926), dapat dibandingkan (0,856) dan dapat dipahami (0,871).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dimana sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dimana untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2004:35). Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Agus Mulyanto, 2009 dalam As Syifa Nurillah dan Dul Muid, 2014). Dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi (As Syifa Nurillah dan Dul Muid, 2014).

Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu kegiatan pencatatan harus lebih teliti dalam mencatat setiap transaksi, setiap transaksi harus menggunakan bukti transaksi supaya menghindari pencatatan yang tidak akurat, dan setiap ada transaksi wajib melakukan pencatatan supaya menghindari transaksi yang tidak tercatat, dan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi-transaksi maupun aset dan persedian. Selanjutnya untuk meningkatkan pelaporan laporan keuangan perlu melakukan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan.

4.2.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,431 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Fenomena mengenai standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan yang dikemukakan oleh Harry Azhar Aziz (2014) yaitu berdasarkan pemeriksaan atas 184 LKPD,

BPK menemukan kasus-kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Menurt Rudy Gunawan (2015) mengatakan bahwa persoalan yang masih menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian adalah salah satunya karena penyajian laporan keuangannya belum sesuai standar akuntansi pemerintahan. Asep Sumpena (2015) juga mengakatan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyajikan laporan keuangannya belum menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual atau sama halnya belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator basis akrual dengan persentase 48,67% dapat diinterpretasikan dalam kategori kurang baik (tidak sesuai basis akrual), terdapat *gap* sebesar 51,33%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh sebesar 22,69% terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai korelasi sebesar 0,615 yang berarti standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh sedang/cukup arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Arah hubungan positif standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang baik akan diikuti dengan kualitas laporan keuangan baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 22,69% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya 77,31% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,67% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya standar akuntansi pemerintahan sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator periode pelaporan 74,00%, selanjutnya indikator komponen-komponen laporan keuangan 71,33% dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator basis akrual 48,67%. Terdapat gap sebesar 35,33% yang merupakan masalah yang ada pada standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya kualitas laporan keuangan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 73,27% dan masuk dalam kategori baik yang artinya kualitas laporan keuangan sudah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator andal sebesar 75,17%, dapat dibandingkan sebesar 73,33%, relevan sebesar 73,11%, dan indikator paling rendah adalah dapat dipahami sebesar 66,00%, namun masih terdapat *gap* sebesar 26,73%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada standar akuntansi pemerintahan dilihat melalui nilai *loading factor*, dapat dilakukan dengan meningkatkan basis akrual (0,932), komponen-komponen laporan keuangan (0,962) dan periode pelaporan (0,932) selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu relevan (0,941), andal (0,926), dapat dibandingkan (0,856) dan dapat dipahami (0,871).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dimana standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2009:25). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138) dan Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rukmi Juwita, 2013). Dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Adapun saran yang diberikan penulis dalam meningkatkan standar akuntansi pemerintahan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sangat diperlukan pegawai yang profesional di bidang akuntansi sektor publik dilihat dari jumlah pegawai lulusan akuntansi sebanyak 8 pegawai lebih besar dari lulusan nonakuntansi sebanyak 22 pegawai, hal ini membuat pegawai kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara bimbingan teknis atau pelatihan secara bertahap mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diperlukan sistem/aplikasi akuntansi yang memadai. Hal ini perlu dikembangkan setiap sistem/aplikasi dalam satuan kerja.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tingggi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah dalam melakukan pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
   a. Masih terdapat kegitatan pencatatan yang sepenuhnya belum optimal.
   b. Masih terdapat kegiatan pengikhtisaran yang sepenuhnya belum optimal.
   c. Masih terdapat pegawai yang cukup kesulitan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.
2. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh sedang/cukup terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, artinya semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintahan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
   a. Dalam meyajikan laporan keuangan masih terdapat belum menerapkan basis akrual.
   b. Dalam menyajikan laporan keuangan masih terdapat cukup sesuai dengan komponen laporan keuangan standar akuntansi pemerintahan.
   c. Pada periode pelaporan masih terdapat cukup terlambat dalam pelaporan laporan keuangan.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Operasional

a) Untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencatatan transaksi/pengelolaan aset. Solusi yang lain adalah meningkatkan jumlah pegawai yang profesional dibidang akuntansi serta mengadakan dan mengikuti pelatihan akuntansi.

b) Untuk meningkatkan standar akuntansi pemerintahan perlu dilakukan persiapan kebijakan terkait standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, peningkatan sistem/aplikasi yang memadai, dan sumber daya manusia yang profesional dibidang akuntansi sektor publik.

2. Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama,

metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi pada pemerintahan pusat atau daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Anwar Nasution. 2009. *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi*. Dialog Publik

Ardeno Kurniawan. 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Problematika dan Solusi*. Artikel: 9 Juli 2013. Melalui <http://inspektorat.slemankab.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-problematika-dan-solusi.slm [03/03/15]>

As Syifa Nurillah dan Dul Muid. 2014. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemamfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok*. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 3 No. 2

Asep Sumpena. 2015. Pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2014. *BPK RI Temukan 5986 Kasus Senilai Rp. 420 Triliun Atas LKPD*. Melalui <http://www.bpk.go.id/news/bpk-ri-temukan-5986-kasus-senilai-rp420-triliun-atas-lkpd [03/03/15]>

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Pemda Harus Menerapkan SAP Berbasis Akrual*. Melalui <http://www.bpk.go.id/news/pemda-harus-menerapkan-sap-berbasis-akrual [03/03/15]>

Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo. 2013. *Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual).* Jurnal STIE Semarang. Vol 5 No. 3, Edisi Oktober 2013

Deddi Nordiawan. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* Jakarta: Salemba Empat

Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian

Garutkab.go.id. 2015. Penyajian Laporan Keuangan Pemda Garut Belum Sesuai SAP. Melalui <http://garutkab.go.id/pub/news/detail/10386-penyajian-laporan-keuangan-pemda-garut-belum-sesuai-sap/ [04/04/15]>

Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan***.** Trikonomika.Volume 11, No. 1

Ihyaul Ulum. 2008. *Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPPS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Indra Arief Pribadi dan Suryanto. 2014. *BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp. 25,74 Triliun*. Ekonomi. Jakarta: Antara news. Melalui <http://www.antaranews.com/berita/467274/bpk-temukan-potensi-kerugian-negara-rp2574-triliun [03/03/15]>

Indra Bastian. 2006. *Audit sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat

Indra Bastian. 2007. *Akuntansi sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga

Liza Rahayu, Kennedy, dan Yuneita Anisma. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau: Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau.* Jom Fekon Vol. 1 Nomor. 2 Oktober 2014

Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

M.balebandung.com. 2015. *Pemkab Bandung Gandeng BPKP Kelola Aset*. Melalui <http://m.balebandung.com/2015-02-09/pemkab-bandung-gandeng-bpkp-kelola-aset [04/04/15]>

Menteri Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Pemerintah dalam negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

Nur Indrianto dan bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Nurlan *Darise*. *2008. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta

Pikiranrakyat.com. 2014. *Bupati Bandung, "Disclaimer sebagai peringatan keras soal ketelitian administrasi".* Melalui < http://www.pikiran-rakyat.com/node/284249 [04/04/15]>

Rukmi Juwita. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214

Siti Nuraisyah Dewi dan Romys Binekasri. 2014. *Kementerian dan Lembaga ini dapat Opini Disclaimer dari PBK*. Vivanews. Melalui < http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/514531-kementerian-dan-lembaga-ini-dapat-opini-disclaimer-dari-bpk [31/03/15]>

Sri Astuti. 2013. *Empat Kualitas Utama Sebuah Laporan Keuangan*. Artikel 18 Maret 2013. Melalui <http://keuanganlsm.com/empat-karakteristik-kualitatif-sebuah-laporan-keuangan-bagian-pertama/ [03/03/15]>

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2014. *Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Vol XI, No. 1 – 2014

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis

Vicky Agustiawan Lasoma. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo

LAMPIRAN

Latent Variable Correlations

	X1	X2	Y
X1	1,000000		
X2	0,357412	1,000000	
Y	0,820605	0,615170	1,000000

Overview

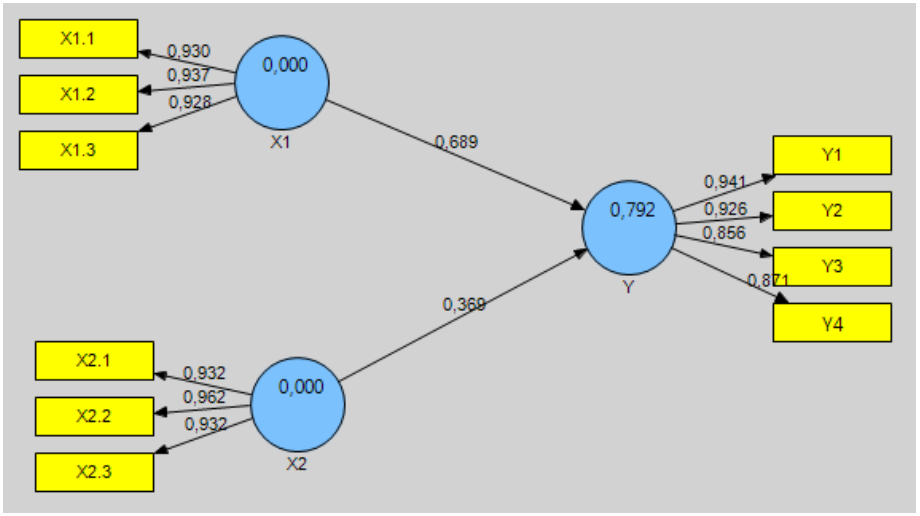
	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha
X1	0,868092	0,951791		0,924215
X2	0,887770	0,959556		0,936749
Y	0,808535	0,944024	0,792170	0,920497

	Communality	Redundancy
X1	0,868092	
X2	0,887770	
Y	0,808535	0,528813

Cross Loadings

	X1	X2	Y
X1.1	0,929859	0,321098	0,757952
X1.2	0,937190	0,386688	0,826605
X1.3	0,928070	0,282735	0,699063
X2.1	0,399062	0,931829	0,600345
X2.2	0,337336	0,962390	0,594289
X2.3	0,267153	0,932101	0,540827
Y1	0,742188	0,626831	0,940726
Y2	0,781142	0,493252	0,926271
Y3	0,638200	0,588212	0,856273
Y4	0,782348	0,506707	0,870629

Path Jalur



T-Statistik

